PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Koran Tempo Hari: Kamis Tanggal: 04 Agustus 2011 Halaman: C3

Pasar Modern Wajib Dukung UMKM

YOGYAKARTA — Pasar modern dalam skala besar, seperti mal dan supermarket, di Kota Yogyakarta wajib mendukung keberadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mekanisme pengaturan ini tertuang dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan UMKM dan peraturan wali Kota, yang saat ini dalam tahap finalisasi.

"UMKM nantinya akan di-*support* oleh pasar modern. Mekanismenya masih dibahas, yang jelas melalui bantuan penyertaan modal Bank Jogja," kata Heru Pria Warjaka, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta, kemarin.

Penyertaan modal yang akan dikucurkan itu untuk mewujudkan kerja sama dalam bentuk pemberian tempat bagi pelaku usaha kecil melalui Bank Jogja Rp 45 miliar. Namun saat ini baru terpenuhi Rp 25 miliar, sehingga masih kurang Rp 20 miliar. Sementara itu, total UMKM yang terdata sekitar 1.800 UMKM, baik jasa maupun perdagangan.

Soal bentuk kemitraan UMKM dengan pasar modern nantinya seperti apa, menurut Heru, masih menunggu peraturan wali kota, setelah rancangan peraturan daerah itu disahkan. Namun, sebelumnya akan dipetakan dulu jumlah UMKM yang ada, kemudian dibandingkan dengan *space* pasar modern yang ada untuk mendapatkan rasio ideal UMKM yang akan diserap.

Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto berharap rancangan peraturan yang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta itu menjadi peraturan yang benar-benar prorakyat.

Herry juga berharap peraturan daerah itu bisa sekaligus mengatur dua bidang, yakni UMKM dan koperasi. "UMKM, bila berkembang, bisa menjadi koperasi. Sebaliknya, koperasi hakikatnya kumpulan UMKM," tuturnya akhir Juli lalu.

Masalahnya, Herry melanjutkan, saat ini undang-undang di pusat justru berpihak kepada pemodal kuat dan tidak berpihak pada UMKM. "Memberi kemudahan pada investasi asing, tapi tidak pada investasi rakyat kecil," katanya.

● PRIBADI WICAKSONO

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005